



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 28 Oktober 2019

Halaman: 1

**WISATA HALAL**

## Pelaku Wisata di Jogja Pilih Moslem Friendly

Herliambang Jati Kusumo  
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Sosialisasi wisata halal harus terus digencarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pasalnya, pemahaman soal wisata halal masih berbeda di antara pelaku wisata.

"Wisata halal itu sensitif, harus benar-benar hati-hati dalam membahas hal ini, jangan sampai market yang sudah *existing* akan menjadi masalah di kemudian hari. Kita bisa belajar banyak dengan Bandung yang cukup berefek negatif akan hal ini," kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie, Minggu (27/10).

Menurut Bobby lebih baik di DIY dikembangkan *moslem friendly*, sehingga tidak mengganggu pasar wisata yang sudah ada. Pelaku wisata di DIY, katanya, bisa belajar banyak dengan NTB dalam membuat zonasi tersebut.

Bobby kurang merekomendasikan untuk di Jogja dikembangkan wisata halal mengingat lokasi geografis DIY yang tidak luas dan DIY berbasis bu-  
 daya. Bobby mendesak Pemerintah Pusat untuk mengkaji kembali urgensi membuat wisata halal di DIY.

Hal hampir sama diungkapkan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, sekaligus pengamat pariwisata, Ike Janita Dewi. Dia mengatakan yang sering menjadi kendala pengembangan wisata halal yakni pemahaman terhadap konsep dan syarat wisata halal yang masih dipersepsikan berbeda-beda.

▶ Halaman 6

---

**Pelaku Wisata...**

"Juga perlu strategi targeting yang cermat dan tepat, karena target pasar DIY adalah wisatawan ASEAN, Jepang, dan Eropa. Belum ada analisis yang komprehensif tentang berapa besar potensi wisata halal dan apakah akan ada dampak pada segmen wisatawan lain," ujar Ike.

Ike mengkritisi Kementerian Pariwisata yang belum pernah menyampaikan secara tuntas, tentang esensi wisata halal tersebut. Penolakan pengembangan wisata halal, kata Ike, disebabkan sejumlah faktor. *Pertama*, ada kekhawatiran dari pelaku wisata wisata halal kurang menguntungkan untuk menasar segmen pasar yang lain. *Kedua*, dikhawatirkan akan mengurangi keunikan budaya. Sementara, besaran potensi wisata halal untuk DIY sendiri belum dianalisis secara cermat dan komprehensif.

Menurut Ike, seharusnya ada percontohan dulu di kawasan terbatas, misalnya di Kotagede. Sehingga perkembangannya bisa dipantau dan dianalisis untuk bisa diadopsi secara luas.

"Dengan penduduk mayoritas muslim, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi DIY untuk menjadi destinasi wisata halal. Hanya saja, destinasi yang mendapatkan predikat halal harus disertifikasi dengan standar tertentu," katanya.

**Bukan Syariat**

Ketua Umum GIPI Indonesia Didien Junaedy menuturkan wisata halal bukanlah bertujuan menerapkan syariat Islam. Menurut dia, telah terjadi kesalahan teknis, pendekatan, dan komunikasi dalam penyampaian konsep wisata halal.

"Cukup banyak negara yang memiliki penduduk Islam sedikit, mencari peluang dengan memiliki rumah makan dengan label halal," ungkapnya, pada pekan pertama September lalu.

Pasalnya, potensi pasar dari Timur Tengah dan Malaysia sangat besar. Indonesia, ujarnya, semestinya bisa belajar dari Jepang, yang gencar menerapkan wisata halal pada restoran dan ruang berdoa untuk melengkapi kebutuhan wisatawan.

Didien menilai pemerintah daerah perlu memperbaiki komunikasi dalam menyampaikan kebijakan, agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya di tengah heterogenitas suku, budaya, dan agama.

**Pengamat pariwisata Septa Nirwandar** mengatakan wisata halal belakangan ini menjadi tren global. Tren ini terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di dunia. Setidaknya, sebanyak 170 juta wisatawan muslim berkelana di berbagai destinasi wisata di dunia. Indonesia sebenarnya masih menggaet sedikit wisatawan mancanegara muslim yakni hanya 3,6 juta orang. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan Thailand enam juta orang, Malaysia lima juta, dan Singapura empat juta wisatawan.

Kekalahan pariwisata Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) muslim ke Indonesia dinilai terjadi karena kurangnya fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim.

"Kenapa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar tidak menangkap peluang ini? Sementara negara-negara lain berhasil melakukannya?"

Dia menegaskan wisata halal bukan berarti mengubah suatu kawasan sesuai syariat Islam, tetapi destinasi tersebut memiliki fasilitas atau pelayanan yang ramah bagi wisatawan muslim.

"*Halal Tourism* itu adalah *extended services* buat pelancong yang memerlukannya. Jadi, tendensinya bukan merujuk pada wisata yang eksklusif," ujarnya.

Pelayanan dan fasilitas itu misalnya, kemudahan menemukan makanan halal, tempat salat memadai, hotel syariah, dan juga tempat rekreasi yang sesuai kebutuhan pelancong. "Tu semua pilihan tentang pelayanan, dan terjadi secara inklusif," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah berupaya mengembangkan 10 destinasi halal prioritas di Indonesia yakni Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

Pada April 2019, Indonesia menerima penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia 2019 versi *Global Muslim Travel Index*. Kementerian Pariwisata meyakini kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi wisata halal Indonesia akan mencapai 7,5 juta orang pada 2024. *(JIB/Minis Indonesia/ Titik Anggoro/ Purba & Yanita Patrialis)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005